

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Ekonomi Regional

##### 2.1.1 Pengertian ekonomi regional

Menurut blakely (1994) ekonomi regional merupakan sebuah proses dimana pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat terlibat untuk merangsang atau mempertahankan kegiatan usaha dan lapangan kerja yang ada. Serta adanya pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan untuk merangsang kesempatan kerja di sektor-sektor yang dapat meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta kelembagaan.

Definisi ini memperkenalkan dimensi bagi pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan tenaga kerja, modal, harga dan produksi yang berkaitan dengan menggerakkan modal sosial. Indikator penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran dapat dipandang sebagai bentuk operasional dari konsep indikator tujuan ekonomi atau produktivitas. Namun indikator ini juga dianggap bagian dari kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) (Rustiadi, dkk,2011). Konsep nilai-nilai sosial dan budaya memberi struktur untuk pembangunan ekonomi yang cenderung diabaikan oleh para ekonom tradisional. Namun, teori pertumbuhan baru di sinkronisasi dengan perspektif baru, pembangunan ekonomi mengacu pada peningkatan kualitas hidup terkait dengan perubahan tetapi belum tentu meningkat dalam segi ukuran dan komposisi penduduk, jumlah sifat pekerjaan lokal, jumlah harga barang dan jasa yang diproduksi secara lokal.

Pembangunan wilayah merupakan konsep utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah, secara luas pembangunan wilayah diartikan sebagai upaya untuk merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam program pembangunan yang memperhatikan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial kelembagaan dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Karakteristik tersebut berhubungan dengan produksi komoditi dari sumberdaya alam, (Nugroho&Dahuri, 2012). Pembangunan ekonomi ini perlu dilihat dari segi kuantitatif dan dimensinya. Kuantitatif terhadap manfaat yang diukur melalui peningkatan tingkat kekayaan dan pendapatan, tersedianya barang dan jasa, meningkatkan keamanan finansial, dan sebagainya. Serta dari segi kualitatif yaitu terciptanya kesetaraan sosial/finansial yang lebih besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan penyebaran pekerjaan dan memperoleh kualitas hidup di daerah.

Sesuai dengan pengertian ekonomi regional dalam merangsang atau mempertahankan kegiatan usaha dan lapangan kerja di dalam suatu wilayah didukung dengan pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan merangsang kesempatan kerja di sektor-sektor yang ada, indikator dalam pembangunan ekonomi wilayah maupun daerah yaitu tingkat kesejahteraan yang diukur melalui peningkatan tingkat kekayaan dan pendapatan. Atas dasar tersebut pendapatan dijadikan sebagai variabel dependen dalam penelitian karena dari peningkatan pendapatan maka dapat dilihat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai oleh pengembangan ekonomi wilayah.

### **2.1.2 Pendekatan Pembangunan Wilayah (Regional)**

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak diharapkan. Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara pemecahannya telah mengalami perkembangan pula (Adisasmita,2005).

Pembangunan tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi manusia mempunyai kebutuhan lainnya yang sanagat banyak jumlahnya dan sangat luas jenisnya. Terdapat perkembangan pemikiran dan pendekatan dari pertumbuhan dngan stabilitas (*growth with stability*), yang pada hakikatnya menghendaki masyarakat yang lebih berkeadilan, dan selanjutnya menempatkan peranan sumber daya manusia (SDM) pada posisi yang utama dan terutama dalam pembangunan, baik sebagai konsumen maupun sebagai faktor produksi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human resource approach*) diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar bagi peningkatan laju pertumbuhan pembangunan. Peningkatan kualitas SDM dipandang sebagai faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan masyarakat.

Dalam hubungan ini investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan *physical capital stock*, tetapi ditunjukkan pula untuk *human capitacl stock*. *Capital stock* adalah untuk menunjang penciptaan lapangan kerja, dan *human resources* untuk menyediakan tenaga kerja terampil. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan perbaikan gizi, diharapkan akan menumbuhkan inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan. Pembangunan harus

merupakan suatu kemauan dan kemampuan internal dalam masyarakat yang bersangkutan, merupakan suatu proses penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, kontribusi dan partisipatif aktif dan kreatif masyarakat lokal dalam pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat mencerminkan perkembangan paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-oriented*), partisipatif (*participatory*), pemberdayaan (*empowerment*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Konsep ini lebih luas dari pada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs approach*).

Secara historis, pendekatan *people oriented*, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal baru. Hal ini sudah dilaksanakan masyarakat secara luas dan masih relevan sampai sekarang. Pendekatan-pendekatan tersebut telah dijabarkan ke dalam suatu interpretasi akademik yang rasional, sehingga menjadi konsep yang dapat dioperasionalkan dan dapat diimplementasikan (*operationable and implementable concept*). Inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi penting. Melalui partisipasi kemampuan masyarakat untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan daerah menjadi kuat. Peran inovasi kelembagaan semakin menempati posisi penting dibanding sekedar inovasi sosial maupun teknologi, sebab inovasi teknologi maupun inovasi sosial hanya dapat diimplementasikan dengan baik jika cukup tersedia kelembagaan yang berfungsi efektif. (Mardikanto&Soebiakto, 2012)

Teori sumber daya manusia dan paradigma ketidaktergantungan dengan daerah lain merupakan pendekatan dasar yang prospektif untuk melakukan perubahan dan pembangunan ekonomi sosial dalam upaya mencapai sasaran jangka panjang, yaitu penguatan kemandirian lokal. Jadi, dimensi lokal atau lokalitas sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam pendekatan pembangunan.

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia dipandang sebagai faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan masyarakat, hal ini berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, kelembagaan juga dianggap penting dalam menciptakan pertumbuhan daerah menjadi kuat. Sehingga penyerapan tenaga kerja dan kelembagaan menjadi bagian dari variabel penelitian. Selain itu, pendekatan dimensi lokal atau lokalitas menjadi penting dan harus

dipertimbangkan dalam pembangunan yang menjadi salah satu pendekatan yang dilihat dalam penelitian.

## **2.2 Pentingnya Dimensi Regional dan Spasial dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah**

Isu pengembangan wilayah baik di negara-negara yang ekonominya maju maupun yang sedang berkembang umumnya bersumber pada dua hal, yaitu keinginan untuk mencapai sederetan sasaran-sasaran nasional dan kehendak untuk mengurangi ketimpangan antara pertumbuhan dan kemunduran ekonomi sub-sub nasional secara efektif. Aspek-aspek struktur spasial pembangunan ekonomi, fasilitas-fasilitas produksi, trayek atau rute transportasi, tata guna tanah dan sebagainya mempunyai arti langsung untuk menghitung investasi. Sedangkan pola kegiatan spasial meliputi arus modal, arus tenaga kerja, arus komoditas (Adisasmita, 2005:6). Aspek-aspek tersebut berpengaruh terhadap usaha-usaha untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan wilayah khususnya dalam pola kegiatan spasial yaitu arus modal, tenaga kerja, arus komoditas, yang dijadikan salah satu inputan dalam sintesa teori untuk dijadikan variabel penelitian.

## **2.3 Peranan Ruang dalam Analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya ruang merupakan prasyarat yang mutlak dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah. Aspek ruang muncul dalam analisis ekonomi wilayah dan perkotaan dalam berbagai bentuk. Dalam analisis yang bersifat mikro, unsur ruang muncul dalam bentuk analisis lokasi perusahaan, luas area pasar, kompetisi antar tempat, dan penentuan harga antar tempat. Sedangkan dalam analisis yang bersifat makro, unsur ruang ditampilkan dalam bentuk analisis konsentrasi industri, mobilitas investasi, dan faktor produksi antar daerah, pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi perkotaan, ketimpangan pembangunan antar wilayah dan analisis pusat pertumbuhan. Ekonomi wilayah perkotaan yang lebih konkret dan terukur, unsur ruang dapat ditampilkan dalam variabel ongkos angkut yang sangat dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh. Sedangkan, jarak yang dianalisis umumnya dari lokasi bahan baku ke lokasi pabrik dan selanjutnya ke pasar, maupun dari daerah permukiman ke pasar atau tempat kerja (Sjafrizal, 2012).

Unsur ruang dapat ditampilkan dalam variabel ongkos angkut digunakan dalam variabel independen penelitian. Ongkos angkut dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh, sedangkan jarak yang dianalisis dalam penelitian yaitu jarak dari lokasi bahan baku ke

lokasi pabrik, ataupun dari lokasi bahan baku ke pasar, ongkos angkut tersebut juga dapat mempengaruhi biaya produksi maupun harga jual hasil produksi di pasar karena itu variabel ongkos angkut akan mempengaruhi penentuan tingkat produksi optimal.

#### 2.4 Pendapatan Regional

Tujuan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan. Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Ada juga pendapatan dari harta tetapi harta adalah akumulasi dari kegiatan sebelumnya. Pendapatan regional adalah (tingkat besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Ada parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. Salah satu parameter terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Parameter lain, seperti peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan terkait dengan peningkatan pendapatan wilayah. Pembangunan wilayah bersangkutan paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*), untuk itu perlu diketahui alat ukur dan metode yang dipakai untuk menetapkan besarnya tingkat pendapatan masyarakat. Dalam pendapatan dan pertumbuhan regional, sangat perlu diketahui tentang konsep/arti nilai tambah. Nilai produksi tidak sama dengan nilai tambah karena di dalam nilai produksi telah terdapat biaya antara (*intermediate cost*) yaitu biaya pembelian/biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung sebagai produksi di sektor lain atau berasal dari impor (dihitung sebagai nilai produksi di negara pengekspor). Nilai tambah inilah yang menggambarkan tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan di wilayah tersebut. Pada umumnya yang termasuk dalam nilai tambah dalam suatu kegiatan produksi yaitu (Tarigan, 2005:14-16).

Tujuan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan. Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Ada juga pendapatan dari harta tetapi harta adalah akumulasi dari kegiatan sebelumnya. Pendapatan regional adalah (tingkat besarnya) pendapatan masyarakat merupakan ukuran terpenting sehingga pendapatan menjadi variabel dependen dalam penelitian.

## 2.5 Pembangunan Sektoral ke Pembangunan Regional dan selanjutnya ke Pembangunan Lokal

Pendekatan sektoral menganggap perlu untuk mendekati pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor-sektor dan sub-sub sektor. Adapun dasar berpijaknya adalah mekanisme pengelolaan satuan maupun kelompok kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak pengembangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha. Tujuan ataupun sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan hasilnya juga terungkap secara sektoral, yaitu baik yang menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi dan kredit yang digunakan. Kesemuanya diungkapkan menurut sektor-sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa. Dimensi wilayah (regional), seperti daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (Kabupaten/kota), hanya tampil sebagai indeks, yakni untuk melokalisasi sektor-sektor ke dalam daerah-daerah.

Aspek ruang dalam pemanfaatan wilayah mencakup aspek lokasi dan dimensi wilayah. Aspek lokasi dan wilayah adalah saling berkaitan. Pendekatan regional yang didasarkan pada perhitungan ruang dalam pemanfaatan wilayah jelas mengandung maksud untuk mengendalikan terciptanya “kemudahan,” baik dalam hal tingkat maupun penyebaran (lokasi) di wilayah-wilayah (Adisasmita, 2005). Pengertian yang melibatkan aspek ruang dalam pemanfaatan wilayah jelas menampilkan sumber dorongan bagi pengembang kegiatan usaha masyarakat.

Pembangunan wilayah dilancarkan melalui pusat-pusat pertumbuhan masing-masing. Pusat-pusat pertumbuhan umumnya merupakan kota besar. Para investor tertarik untuk menanamkan investasinya di sektor industri, perbankan dan keuangan, *property*, dan lainnya. Dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah-daerah tidak semata-mata menekankan pada peranan kekuatan luar (*external forces*) tetapi sudah saatnya untuk mengutamakan pada peranan kekuatan dari dalam (*internal forces*), yang dilakukan melalui upaya-upaya mendorong pengembangan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat setempat. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau disebut pula pembangunan ekonomi lokal.

Lingkup regional dapat meliputi provinsi atau kabupaten/kotamadya. Provinsi terdiri dari kabupaten-kabupaten mencakup sejumlah kecamatan. Sedangkan lokal atau lokalisasi dikonotasikan dengan suatu area yang relatif terbatas, dimana pemanfaatan berbagai sumberdaya alam, manusia, sosial, fisik, teknologi, dan kelembagaan dapat ditingkatkan lebih intensif dan interaktif untuk meningkatkan kegiatan perekonomian lokal yang lebih sejahtera. Secara empirik, penentuan unit perencanaan pembangunan wilayah yang luas (meliputi beberapa provinsi, satu provinsi, atau beberapa kabupaten) berdasar pengalaman yang lalu ternyata kurang memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu muncul suatu keinginan untuk menentukan unit perencanaan yang lebih sempit (kecil) yang dikenal dengan sebutan wilayah pengembangan ekonomi lokal atau lokalisasi.

Kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau disebut pula pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu muncul suatu keinginan untuk menentukan unit perencanaan yang lebih sempit (kecil) yang dikenal dengan sebutan wilayah pengembangan ekonomi lokal. Sehingga salah satu fokus dalam penelitian yaitu melihat bagaimana pengaruh pendekatan ekonomi lokal dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

## **2.6 Pembangunan Ekonomi Lokal**

Kepentingan ekonomi nasional dan motivasi perusahaan besar seringkali tidak sesuai bahkan berbeda secara nyata dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal, para pekerja lokal yang tidak memiliki keterampilan atau golongan masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang berpendapatan rendah dan perusahaan kecil yang tersebar di seluruh daerah yang modalnya, keterampilannya, kemampuan manajemennya dan pemasarannya masih lemah. Dalam sistem ekonomi pasar, pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya pembangunan diarahkan untuk mencapai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya perusahaan yang ada sekarang dan perusahaan baru, serta mempertahankan basis ekonominya yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Dalam pembangunan ekonomi lokal, masyarakat harus memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, sumberdaya sosial, sumberdaya institusional (kelembagaan) dan sumberdaya fisik yang dimiliki untuk menciptakan suatu sistem perekonomian yang mandiri (dalam arti berkecukupan dan berkelanjutan).

Pembangunan ekonomi lokal tidak hanya merupakan retrorika baru tetapi mencerminkan suatu pergeseran fundamental peranan pelaku-pelaku pembangunan, demikian pula sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Secara esensial, peranan pemerintah lokal dan kelompok-kelompok berbasis masyarakat dalam mengelola sumberdaya berupaya untuk mengembangkan usaha baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (Adisasmita, 2005). Ciri atau sistem utama suatu pembangunan yang berorientasi atau berbasis ekonomi lokal adalah menekankan pada kebijaksanaan pembangunan pribumi yang memanfaatkan potensi sumberdaya manusia lokal, sumberdaya manusia lokal, sumberdaya institusional lokal dan sumberdaya fisik lokal.

Orientasi ini menekankan pada pemberian prakarsa lokal (*local initiatives*) dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara luas. Alasan untuk hal itu adalah sebagai berikut. Teori dan program pembangunan ekonomi sebelumnya sangat menekankan pada anggapan bahwa manfaat pertumbuhan dan perluasan ekonomi pada pusat-pusat pembangunan (perkotaan) akan menetes atau menyebar ke bawah (*tricking down effect*) untuk memperbaiki kondisi penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan.

Ciri atau sistem utama suatu pembangunan yang berorientasi atau berbasis ekonomi lokal adalah menekankan pada kebijaksanaan pembangunan yang memanfaatkan potensi sumberdaya manusia lokal, sumberdaya manusia lokal, sumberdaya institusional lokal dan sumberdaya fisik lokal. Hal ini menjadi salah satu dasar peneliti mengidentifikasi pendekatan ekonomi lokal murni sebagai salah satu focus pendekatan ekonomi yang ada di dalam penelitian.

## **2.7 Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal**

Strategi pembangunan pedesaan berbasis lokal adalah pembangunan yang menggunakan pendekatan kewilayahan yang memprioritaskan pengembangan potensi serta pelaku lokal dari suatu daerah tertentu (*locality*).

Tingkat keberhasilan pembangunan pedesaan dapat dinilai dari beberapa indikator, indikator tersebut dapat digunakan sebagai *proxies* dari kemajuan pembangunan pedesaan. Secara garis besar, ada tiga fungsi utama indikator keberhasilan pembangunan pedesaan sekaligus karakteristik indikator yaitu:

1. Digunakan sebagai tolak ukur perkembangan pedesaan sehingga dapat digunakan sebagai standar evaluasi program/strategi

2. Digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan yang akan diambil
3. Digunakan sebagai dasar perbandingan kemajuan pembangunan antardesa di Indonesia

Berdasarkan fungsi indikator tersebut, ada delapan kelompok besar untuk menilai pembangunan perdesaan yaitu:

a. Infrastruktur

Pembangunan perekonomian perdesaan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internalnya yaitu ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi agar dapat tercapainya tujuan pembangunan, terutama peningkatan ekonomi. Infrastruktur dapat dilihat secara fisik yaitu infrastruktur berupa (transportasi, komunikasi, irigasi, dan listrik), ekonomi, kesehatan, pendidikan. Dalam mengukur efektivitas infrastruktur, digunakan beberapa variabel yaitu:

b. Pembangunan pertanian

Petani kecil yang ada di pedesaan merupakan segmen paling besar yang terdapat dalam sektor swasta (*private sektor*) di negara berkembang. Sebagian besar pendapatan negara berkembang berasal dari pertanian, selain itu pertanian juga merupakan sumber pangan yang paling utama. Sehingga produktivitas pertanian sebuah desa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Untuk itu beberapa variabel yang dapat menggambarkan potensi kemampuan desa dalam memproduksi hasil pertanian, juga sebagai ukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pertanian. Variabel tersebut yaitu:

- 1) Proporsi luas lahan sawah beririgasi
- 2) Proporsi luas lahan sawah non-irigasi
- 3) Proporsi luas lahan pertanian non-sawah
- 4) Ladang yang diusahakan
- 5) Ladang yang tidak diusahakan
- 6) *Index Multiple Cropping*

Menurut (Bahari, 2004 dalam Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal) ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan pertanian yaitu: 1) akses terhadap kepemilikan tanah; 2) akses

input dan proses produksi; 3) akses terhadap pasar; 4) akses terhadap kebebasan.

c. Tingkat industrialisasi

Industri yang diharapkan yaitu jenis-jenis industri yang mendukung dan memiliki keterkaitan dengan sektor peranian sebagai basis utama perekonomian. Semakin tinggi tingkat industrialisasi di perdesaan memberikan gambaran semakin kuat posisi perdesaan terhadap fluktuasi ekonomi.

Variabel yang digunakan untuk mewakili tingkat industrialisasi adalah:

- 1) Sentra industri
- 2) Lingkungan industri kecil
- 3) Jumlah industri besar, sedang, kecil
- 4) Proporsi masing-masing industri kecil

d. Kondisi usaha non-pertanian

Usaha non-pertanian turut berperan dalam menciptakan keseimbangan yang ada di perdesaan, dengan cara menggalakkan aktivitas industri. Variabel yang digunakan sebagai indikator untuk usaha non-pertanian. Variabel yang digunakan sebagai indikator untuk usaha non-pertanian adalah:

- 1) Sektor pariwisata
- 2) Jasa restoran
- 3) Jasa perbengkelan
- 4) Jasa-jasa lainnya

e. Aspek kelembagaan dan modal sosial

Keberadaan lembaga formal baik informal di perdesaan menjadi salah satu modal sosial yang harus dibentuk. Kelmbagaan formal dan informal yang ada dapat berperan dlam menyelesaikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis transaksi menjadi sebuah hubungan yang didasarkan kepercayaan dan norma masyarakat. Modal sosial memberikan alternative yang lebih efisien dalam menyelesaikan permasalahan seperti ekstrnalitas, hak kepemilikan, *free rider*, dan bahkan hak monopoli. Variabel yang dapat digunakan keberadaan lembaga-lembaga tersebut yaitu:

- 1) Organisasi sosial kemasyarakatan
- 2) Kegotongroyongan
- 3) Lembaga swadaya masyarakat

- 4) Ketersediaan perangkat desa
- 5) Fasilitas perlindungan sosial

Banyak aspek yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal yaitu peningkatan infrastruktur, pembangunan pertanian, tingkat industrialisasi, kondisi non pertanian serta kelembagaan yang digunakan sebagai variabel-variabel untuk mencapai pembangunan ekonomi wilayah khususnya dalam peningkatan pendapatan pemilik lahan.

## 2.8 Strategi Kemitraan

Partisipasi terdiri atas tiga tujuan yaitu: 1) merupakan sumber informasi dan kebijaksanaan daam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan, 2) suatu alat untuk mengorganisir persetujuan dan pendukung untuk tujuan program serta perencanaan, dan 3) suatu cara membenaran, perlindungan individu, dan kelompok. (Rustiadi, Saefulhakim Panuju, 2009:363). Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan bermacam startegi yang masing-masing memiliki sasaran yang ingin dicapai. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada kemampuan perencanaan atau organisator dan organisasinya.

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah melibatkan masyarakat di dalam organisasi untuk mengantisipasi kendala yang ada. Dalam hal ini masyarakat bukan merupakan alat untuk mencapai tujuan, namun sebagai mitra yang akan membentuk organisasi dalam mencapai tujuan. Strategi ini digambarkan sebagai proses menarik elemen ke dalam kebijakan atau kepemimpinan suatu organisasi serta sebagai alat untuk mengalihkan atau mencegah ancaman yang dapat mengganggu keberadaannya.

Perbedaan antara kemitraan formal dan informal terletak pada kemampuan peserta untuk mempengaruhi kebijakan. Kemitraan informal merupakan suatu pembagian kekuasaan untuk hal-hal ang sifatnya khusus karena adanya ancaman atau tekanan, sedangkan kemitraan formal hanya mencari pengakuan publik dengan cara membangun hubungan karena tidak diantisipasi dengan kebijakan organisatoris akan resiko yang akan dihadapi. Permasalahhan kemitraan adalah tidak seluruh masyarakat membutuhkan hak kekuasaan dan sanksi baik dari masyarakat membutuhkan hak kekuasaan dan sanksi baik dari masyarakat umum maupun masyarakat yang dilibatkan. Kemitraan dipandang penting dan semakin memperoleh tempat dalam pengembangan industri perdesaan. Didalamnya terkandung potensi hubungan yang saling menguntungkan. Dari hubungan kemitraan diharapkan industri perdesaan dapat lebih terdorong perkembangannya sehingga memiliki kekuatan yang dinamis dengan

terciptanya penyebaran teknologi, dan ketrampilan, peningkatan akses pemasaran dan sumber bahan baku, serta penguatan modal. Pada umumnya kemitraan bisa pula berlangsung antar skala usaha (*horizontal linkage*) atau inter skala usaha (*vertical linkage*). Namun dalam praktek pengembangan, kemitraan sering dibatasi dalam pola kemitraan yang vertikal antara industri perdesaan yang skalanya kecil dengan industri besar modern. Pengembangan ekonomi wilayah merupakan pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada pendayagunaan melalui suatu forum kemitraan yang dinilai dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), kelembagaan (Suyono,2006:24). Kemitraan yang dibentuk adalah yang melibatkan seluruh komponen lapisan masyarakat, disini dimaksudkan agar kemitraan tersebut berjalan dinamis dan dapat memberikan dampak yang baik bagi pengembangan ekonomi agar terjadi sinergi kerja yang serasi, maka semua stakeholder termasuk pemerintah ikut aktif dalam kemitraan, dengan kemitraan maka kepentingan masyarakat dapat terakomodasi. Dalam kemitraan ini pemerintah memfasilitasi kepentingan masyarakat maupun kepentingan sektor swasta.

Kemitraan merupakan salah satu pendekatan dalam kegiatan pembangunan, kemitraan merupakan salah satu pendekatan yang menjadi fokus dalam penelitian karena kemitraan merupakan pendekatan yang dibentuk dengan melibatkan seluruh komponen lapisan masyarakat yang prosesnya masih perlu dilihat lebih lanjut apakah berjalan dinamis dan memberikan dampak yang baik bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

## **2.9 Sintesa Teori**

Sintesa teori dilakukan untuk menentukan variabel-variabel penelitian yang didasarkan dari teori-teori yang mendukung tujuan penelitian. Sintesa teori penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Sintesa Teori Studi Kasus Ekonomi Wilayah

Teori Pendukung		Variabel
Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan, kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan, pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. (Robinson Tarigan, 2005)	Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran (kesejahteraan) penduduk. Pembangunan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional rill dalam suatu jangka waktu yang panjang. (Adisasmita, 2005)	-
Pembangunan wilayah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja, dan sumberdaya manusia, investasi modal, transportasi, komposisi industri, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas (Adisasmita, 2005).	Pembangunan wilayah merupakan konsep utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah, secara luas pembangunan wilayah diartikan sebagai upaya untuk merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam program pembangunan yang memperhatikan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial kelembagaan. Karakteristik tersebut berhubungan dengan produksi komoditi dari sumberdaya alam. (Nugroho&Dahuri, 2012)	Dalam pandangan eksploratif, sumberdaya alam adalah <i>the engine of growth</i> (mesin pertumbuhan). Manusia mentransformasikan sumberdaya alam menjadi sumberdaya buatan ( <i>man-made capital</i> ) yang memiliki nilai yang lebih tinggi yang menyebabkan produktivitas dan kesejahteraan manusia menjadi lebih tinggi/lebih baik. (Rustiadi, et.all,2011)
Pada organisasi spasial produksi atau perwilayahan produksi pertanian, sistem besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh produsen dapat dipahami dengan konsep jarak, dimana dalam mekanisme pertukaran produk pertanian, jarak antara lokasi dengan pusat pasar ditentukan oleh jarak. (Rustiadi, et.all,2011)	Ekonomi wilayah perkotaan yang lebih konkret dan terukur, unsur ruang dapat ditampilkan dalam variabel ongkos angkut yang sangat dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh. Sedangkan, jarak yang dianalisis umumnya dari lokasi bahan baku ke lokasi pabrik dan selanjutnya ke pasar. (Sjafrizal, 2012)	-
Indikator penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran dapat dipandang sebagai bentuk operasional dari konsep indikator tujuan ekonomi atau	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan perencanaan wilayah membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga mendorong	Penyesuaian ekonomi lokal dan pasar tenaga kerja daerah tergantung pada kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perubahan yang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan rill</li> <li>• Kenaikan pendapatan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi komoditi sumberdaya alam</li> <li>• Transformasi Sumber Daya Alam</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Investasi modal</li> <li>• Transportasi</li> <li>• Komposisi industri</li> <li>• Aspek sosial kelembagaan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak lokasi produksi dan pasar</li> <li>• Jarak lokasi bahan baku ke lokasi pabrik</li> <li>• Ongkos angkut</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kerja</li> <li>• Penyerapan tenaga kerja</li> <li>• Tingkat pengangguran</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja</li> </ul>

<p>produktivitas. Namun indicator ini juga dianggap bagian dari kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) (Rustiadi, et.all,2011)</p>	<p>peningkatan pendapatan, dengan demikian kebijakan harus mendukung keterampilan, pelatihan, dukungan bisnis, dan aktivitas tenaga kerja. (Glasson&amp;Marshall, 2007)</p>	<p>sedang berlangsung dalam permintaan tenaga kerja. (Pike, Rodriguez, 2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan tenaga kerja</li> <li>• Permintaan tenaga kerja</li> <li>• Peningkatan pendapatan</li> <li>• Kebijakan pelatihan keterampilan</li> </ul>
<p>Luas sawah tanaman padi berpengaruh positif terhadap produksi total padi di setiap daerah di Kabupaten Gowa, yakoni terjadi peningkatan luas sawah sebesar satuhektar maka mampu meningkatkan jumlah produksi padi sebanyak ton dalam setahun. (Aminuddin, 2009)</p>	<p>Tinggi rendahnya tingkat produksi hasil pertanian ditentukan oleh tingkat penggunaan faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang turut menentukan tingkat produksi hasil pertanian adalah luas lahan. (Ekaputri, 2008)</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan</li> <li>• Tingkat produksi</li> <li>• Jumlah produksi</li> </ul>
<p>Teori pertumbuhan baru di sinkronisasi dengan perspektif baru, pembangunan ekonomi mengacu pada peningkatan kualitas hidup terkait dengan perubahan tetapi belum tentu meningkat dalam segi ukuran dan komposisi penduduk, jumlah harga barang dan jasa yang diproduksi secara lokal. (Adisasmita, 2005)</p>	<p>Kebijakan moneter harus fokus pada menjaga stabilitas harga jual dalam wilayah secara keseluruhan sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan pasar. (Pike, Rodriguez, 2006)</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga jual</li> <li>• Harga barang jasa (biaya hidup)</li> <li>• Komposisi penduduk</li> </ul>
<p>Bila ada pasar yang cukup besar dan ada akumulasi modal akan mendorong pembagian kerja dan meningkatkan pendapatan nasional dan memperbesar jumlah penduduk. Penduduk merupakan bangsa pasar karena merupakan sumber tabungan yang digunakan untuk akumulasi modal, dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan yang semakin meningkat. (Adisasmita, 2005)</p>	<p>Semakin luas pasar di wilayah perkotaan, mendorong proses transaksi secara optimum dan random (<i>averaging of random variation</i>).</p>	<p>Permintaan dari daerah sendiri maupun dari daerah lain penting untuk tumbuhnya sektor unggulan karena masuknya tawaran yang relatif tergantung pada mobilitas antar daerah tersebut. (Pike&amp;Rodriguez, 2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal</li> <li>• Pasar</li> <li>• Permintaan pasar</li> </ul>
<p>Inovasi lebih berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan penemuan ilmiah baru, inovasi pada dasarnya penerapan pengetahuan baru untuk dapat mengembangkan atau menghasilkan suatu produk baru yang</p>	<p>Proses transformasi bahan baku dalam produktivitas memiliki nilai komersial dan daya saing tinggi dalam kemampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan permintaan dan kondisi pasar. (Vazquez&amp;Vaillancourt, 2008)</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi produk baru</li> <li>• Transformasi bahan baku</li> <li>• Diversifikasi</li> </ul>

<p>mempunyai manfaat dan nilai ekonomi lebih tinggi. (Sjafrizal, 2012)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara esensial, peranan pemerintah lokal atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat (<i>community based groups</i>) dalam mengelola sumberdaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (wilayah) ekonomi. (Adisasmita, 2005)</li> <li>• Peranan pemerintah lokal dan kelompok-kelompok berbasis masyarakat dalam mengelola sumberdaya berupaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (Adisasmita, 2005)</li> </ul>	<p>Inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (<i>empowerment</i>) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi penting. Melalui partisipasi kemampuan masyarakat untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan. Peran inovasi kelembagaan semakin menempati posisi penting dibanding sekedar inovasi sosial maupun teknologi, sebab inovasi teknologi maupun inovasi sosial hanya dapat diimplementasikan dengan baik jika cukup tersedia kelembagaan yang berfungsi efektif. (Mardikanto&amp;Soebiakto, 2012)</p>	<p>Bagi negara dan daerah untuk mencapai hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, adanya keseimbangan kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah dan swasta yaitu focus pada peningkatan produktivitas dan daya saing dan pengurangan biaya produksi. (Stimson, et.all, 2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peranan pemerintah</li> <li>• Peranan kelompok berbasis masyarakat</li> <li>• Kemitraan</li> <li>• Kemandirian masyarakat</li> <li>• Kebijakan pemerintah</li> <li>• Kebijakan swasta</li> <li>• Kelembagaan</li> </ul>
<p>Salah satu teori pertumbuhan wilayah mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumberdaya yang digunakan dalam sektor industri. (Adisasmita, 2005)</p>	<p>Pertumbuhan wilayah sangat tergantung dengan produk yang dihasilkan oleh industri yang ada, industri tersebut seperti dialami banyak Negara dalam awal pertumbuhannya Antara lain, minyak, hasil perkebunan dan pertanian dan produk primer lainnya. (Rustiadi, et.all,2011)</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor industri</li> <li>• Produk industri</li> </ul>

Sesuai dengan sintesa teori yang telah didapatkan dari berbagai sumber pada Tabel 2.1, selanjutnya dengan mengeliminasi beberapa variabel yang memiliki kesamaan dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2 Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Sub Variabel	Satuan	Sumber Pustaka
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan rill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rupiah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Robinson Tarigan, 2005)</li> <li>• (Adisasmita,2005)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi komoditi Sumber Daya Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekuensi produksi</li> <li>• Jumlah produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka</li> <li>• Kilogram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Adisasmita,2005)</li> <li>• (Nugroho&amp;Dahuri, 2012)</li> <li>• (Rustiadi, et.all,2011)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia (Tenaga kerja)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan tenaga kerja</li> <li>• Permintaan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase</li> <li>• Orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Glasson&amp;Marshall ,2007)</li> <li>• (Rustiadi, et.all,2011)</li> <li>• (Pike, Rodriguez,2006)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hektar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Rustiadi, et.all,2011)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga jual bahan baku</li> <li>• Harga jual inovasi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rupiah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Adisasmita,2005)</li> <li>• (Pike, Rodriguez,2006)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak lokasi produksi dan pasar</li> <li>• Jarak lokasi bahan baku ke pabrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kilometer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Adisasmita,2005)</li> <li>• (Pike, Rodriguez,2006)</li> <li>• (Vazquez&amp;Vaillancourt,2008)</li> <li>• (Sjafrizal, 2012)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk kerjasama dengan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Adisasmita,2005)</li> <li>• (Stimson, et.all,206)</li> <li>• (Mardikanto&amp;Soebianto,2012)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk kerjasama dengan pabrik gula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Rustiadi, et.all,2011)</li> <li>• (Adisasmita,2005)</li> </ul>

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan pada penelitian yang memiliki relevansi dengan materi sesuai dengan kajian yang dilakukan untuk menambah wawasan bagi penyusun. Studi yang dijadikan tinjauan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.10.

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul penelitian dan nama peneliti	Tujuan	Variabel	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Dampak PT. PG Gorontalo Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi di Desa Lakeya (Zainuddin, 2012)	Mengetahui karakteristik Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik fisik</li> <li>• Karakteristik sosial untuk mengetahui mengenai kependudukan Desa Lakeya</li> <li>• Karakteristik ekonomi untuk mengetahui mata pencaharian, jumlah jasa dan perdagangan</li> <li>• Karakteristik kelembagaan</li> <li>• Karakteristik produksi dan distribusi</li> <li>• Persepsi masyarakat</li> </ul>	Analisis Deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik Desa Lakeya sebagai desa yang dipengaruhi oleh adanya keberadaan pabrik gula.	Studi ini menghasilkan dampak PT. PG Gorontalo terhadap sosial dan ekonomi di Desa Lakeya
		Menganalisa dampak PT. PG Gorontalo terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Desa Lakeya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak sosial</li> <li>• Dampak ekonomi</li> </ul>	Analisis dampak PT. PG Gorontalo terhadap kondisi sosial-ekonomi dengan menggunakan kriteria penentuan dampak penting dengan menggunakan Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 56 Tahun 1994	Studi ini menghasilkan kesimpulan mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap masyarakat pedesaan
2.	Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis perubahan kondisi ekonomi petani</li> </ul>	Variabel bebas: Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan	Pendekatan penelitian memadu metode kuantitatif-kualitatif dengan analisis diantaranya,	Beralihnya fungsi lahan pertanian tidak sekedar berdampak terhadap permasalahan penyempitan lahan

Tebu dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pedesaan (Rauf Hatu, 2010)

sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu

- Menganalisis perubahan peranan sosial petani
- Menganalisis perubahan orientasi nilai budaya petani sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu
- Menganalisis perubahan stratifikasi sosial petani sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu
- Menganalisis kesempatan kerja dan berusaha petani sebelum alih fungsi perkebunan tebu
- Menganalisis pandangan masyarakat petani terhadap dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan

tebu

Variabel terikat:

Kondisi petani

Kondisi peranan sosial petani

Kondisi orientasi nilai budaya petani

Kondisi stratifikasi sosial petani

Kondisi kesempatan bekerja dan berusaha petani

Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu terhadap perubahan sosial petani



analisis data tentang pendapat masyarakat petani tentang perubahan sosial masyarakat petani sebelum dan sesudah terjadi alih fungsi dengan analisis uji Wilcoxon (Suharyadi dan Purwanto, 2004).

semata, namun berdampak pula terhadap akses pemilik lahan, serta berdampak pada terjadinya perubahan maupun pergeseran pola mata pencaharian utama masyarakat dari sektor pertanian. Faktor pendorong terhadap perubahan sosial masyarakat petani berasal dari faktor internal masyarakat petani, yakni ketidakmampuan petani karena rata-rata petani hanya memiliki pendidikan sekolah dasar untuk mempertahankan lahan pertanian yang sebelumnya sebagai sumber kehidupan petani dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sesuai Tabel 2.2 dari skripsi dengan judul Dampak PT. PG Gorontalo Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi di Desa Lakeya (Zainuddin, 2012), peneliti menjadikan hasil penelitian yaitu dampak PT. PG Gorontalo terhadap perubahan dan ekonomi yang ada di wilayah studi peneliti, hasil skripsi tersebut menunjukkan masuknya PT. PG Gorontalo terhadap sosial dan ekonomi mengenai penyerapan tenaga kerja dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah masyarakat Desa Lakeya yang menjadi karyawan PT. PG Gorontalo. Hasil penelitian dijadikan peneliti sebagai salah satu latar belakang penelitian, yaitu pengaruh masuknya PT. PG. Gorontalo terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Paguyaman. Dalam penelitian dengan judul Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pedesaan (Rauf Hatu, 2010), dalam disertasi tersebut fokus mengarah pada perubahan alih fungsi lahan setelah masuknya pabrik gula, sehingga dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa adanya perubahan alih fungsi lahan di Kecamatan Paguyaman setelah masuknya PT. PG. Gorontalo. Masuknya PT. PG. Gorontalo memberikan kontribusi besar pada beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan serta berdampak pada terjadinya perubahan maupun pergeseran pola mata pencaharian utama masyarakat dari sektor pertanian yang menyebabkan melemahnya sub-sistem agropolitan Provinsi Gorontalo.